

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hakekat pembangunan Nasional meliputi pembangunan manusia seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena itu pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan kualitas hidup manusia. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Maka upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Peningkatan kualitas hidup manusia yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang seringkali saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Persoalan penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup manusia adalah isu tentang kualitas hidup dan pengendalian kuantitas penduduk.

Beberapa isu tentang pengendalian kuantitas penduduk yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, tingginya angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun, pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah sehingga perilaku seks pra nikah disebagian kalangan remaja cenderung tinggi serta belum optimalnya pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) dalam mendukung pembinaan kelestarian ber-KB.

Berdasarkan realitas tersebut, sangat diupayakan usaha penanganannya dengan mempertimbangkan baik pendekatan sektoral maupun kewilayahan serta melibatkan partisipasif aktif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kota Tebing Tinggi. Dalam kerangka

meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasinya di Kota Tebing Tinggi, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Perangkat daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026 berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi;

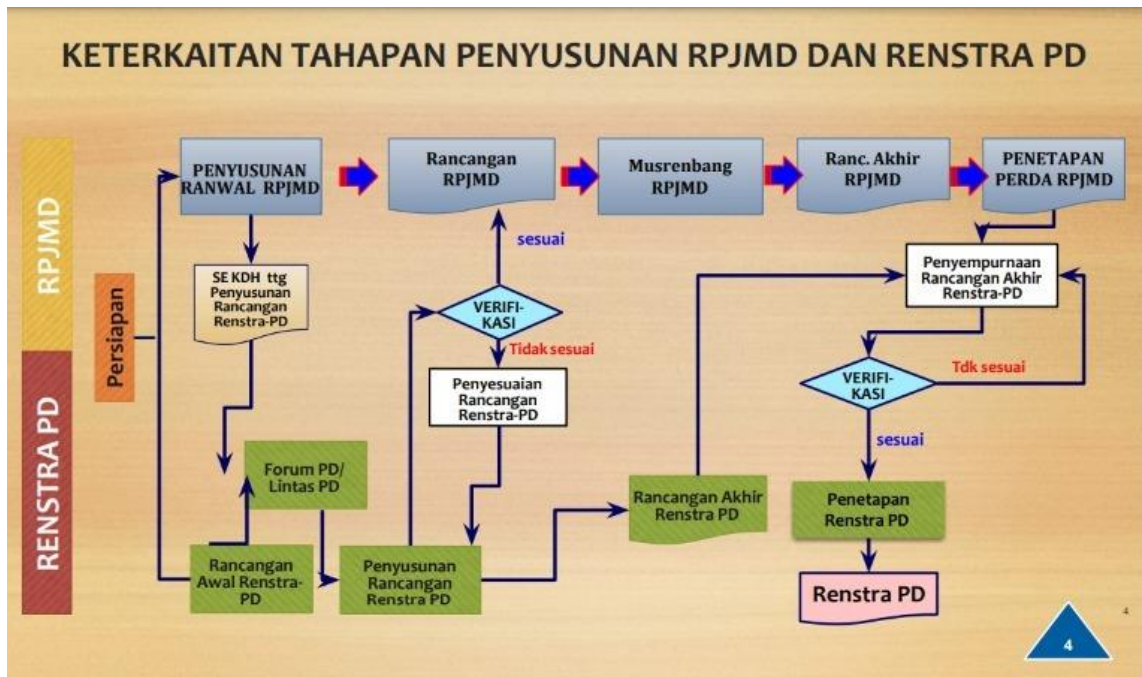
1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Penyusunan Rancangan awal Renstra
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
4. Penetapan Keputusan Renstra.

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini menjadi pedoman untuk empat tahun mendatang yang berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 1.3. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD.



Gambar 1.4. Keterkaitan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra propinsi/ Kabupaten/Kota dengan Renja Perangkat Daerah.



## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
  12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025.
  13. Peraturan daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033;
  14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
  15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi;
  16. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 16 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. Dimana renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dengan

memperhitungkan peluang, potensi dan kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa mendatang.

### **1.3.2 Tujuan:**

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi, yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi sesuai Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
- 2) Menyediakan pedoman penyusunan rencana kerja (renja ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi beserta penganggaran program dan kegiatannya selama periode tahun 2023-2026.
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran serta Pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi selama tahun 2023-2026.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi.

### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris daerah.

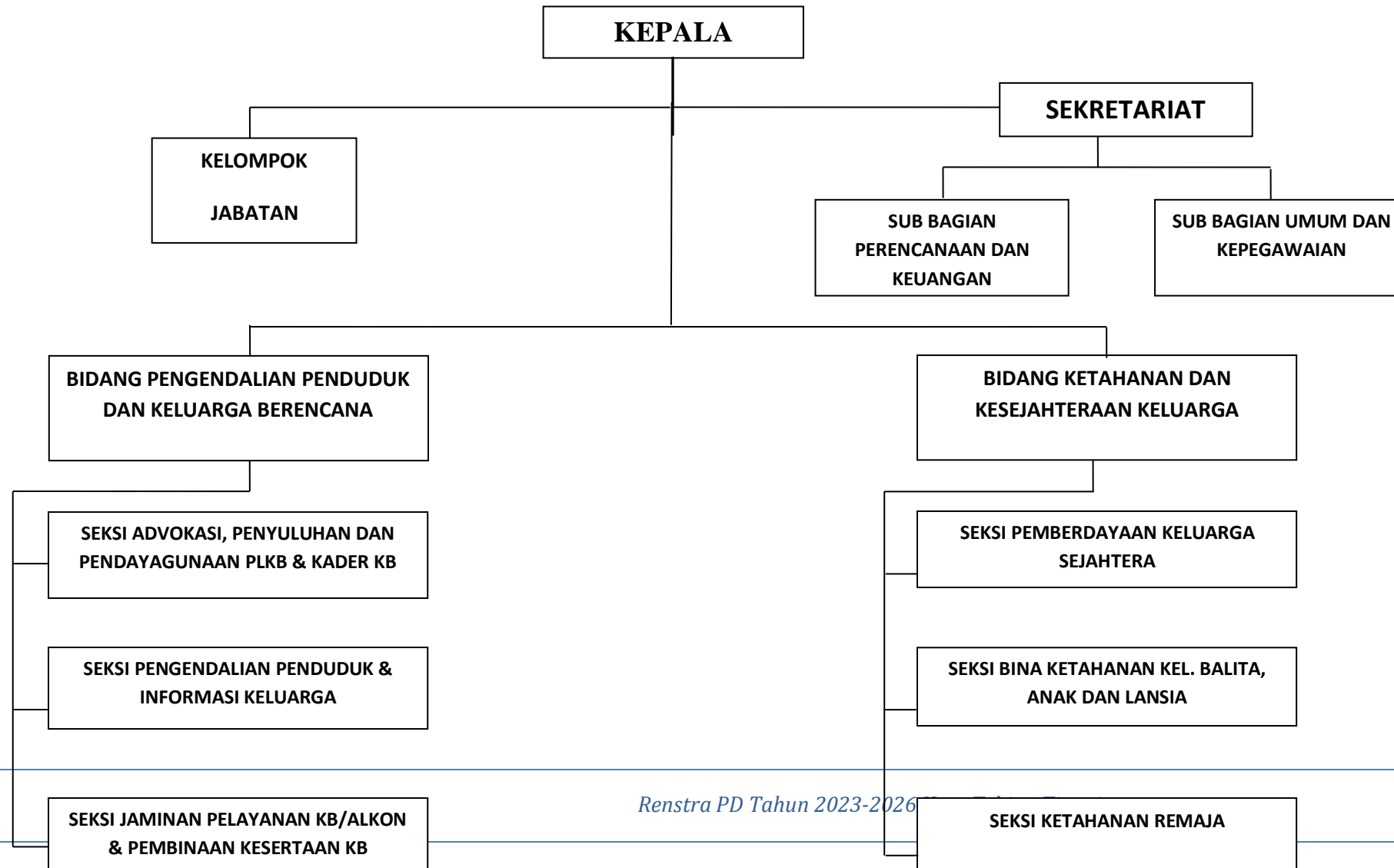
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang susunan organisasi perangkat daerah dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 tahun 2021 Tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari;
  1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
  2. Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga
  3. Seksi Jaminan Pelayanan KB/ Alokasi dan Pembinaan kesertaan KB
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , terdiri dari:
  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera ;
  2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga , Balita, Anak dan Lansia ; dan
  3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
- e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI**



### **2.1.2 Uraian Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 tahun 2021 Tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan.

#### **A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas bidang pengelolaan kesekretarisan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretarisan.
2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang undangan.
3. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
4. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi lingkup dinas.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum an kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang

perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan
6. Pelaksanaan pelaporan sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB**

Seksi Advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas pelaksanaan sebagian fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas seksi advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.
- b. Pelaksanaan kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Jaminan Pelayanan KB/Alokon dan Pembinaan kesertaan KB.

Seksi jaminan pelayanan KB/Alokon dan pembinaan kesertaan KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang jaminan pelayanan KB/alokon dan pembinaan kesertaan KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Jaminan Pelayanan KB/Alokon dan pembinaan kesertaan KB mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jaminan pelayanan KB/Alokon dan pembinaan kesertaan KB.
- b. Pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB/ Alokon dan pembinaan kesertaan KB
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan jaminan pelayanan KB/Alokon dan pembinaan kesertaan KB.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumuan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera

Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, ekssi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga dibidang bina ketahanan keluarga, balita, anak dan Lansia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
  - b. Pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
  - c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
- Seksi ketahanan remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dibidang bina ketahanan remaja.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi bina ketahanan remaja mempunyai fungsi;
- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang bina ketahanan remaja;
  - b. Pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja
  - c. Pelaksanaan pelaporan bidang bina ketahanan remaja
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dalam menjalankan program dan kegiatannya agar mencapai keberhasilan didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai.

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi didukung oleh 47 orang pegawai yang terdiri dari 14 Orang

pejabat Struktural (1 orang pejabat eselon II, 3 Orang pejabat eselon III, 8 Orang pejabat eselon IV), 15 Orang petugas lapangan KB, 9 Orang staf dan 11 orang tenaga kontrak dinas.

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas PPKB per Desember Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	kategori				Jumlah
		PNS		NON PNS		
		LK	PR	LK	PR	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	5	2	2	10
3	D3	-	5	-	2	7
4	S1	5	17	1	4	27
5	S2	1	2	-	-	3
6	S3	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		7	29	3	8	47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi dimana pegawai yang dimiliki rata-rata berpendidikan strata 1.

Berdasarkan tingkat golongan pegawai yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dapat dilihat sebagai berikut;

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas PPKB per Desember Tahun 2021**

NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Golongan II	1	-	1
2	Golongan III	2	23	25
3	Golongan IV	3	7	10
<b>TOTAL</b>				<b>36</b>

Dari tabel diatas dapat lihat bahwa pegawai yang dimiliki Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Tebing Tinggi sebagian besar terdiri dari golongan III.



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan keadaan sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas PPKB per Desember 2021**

No	URAIAN	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Microbus (mobil penumpang 15-30 orang) / Mobil Akseptor KB	1	-	1
2	Minibus(penumpang 14 orang ke bawah)	1	-	1
3	Mobil Pelayanan KB	1	-	1
4	Mobil penerangan KB	1	-	1
5	Mobil unit visual mini	1	-	1
6	Sepeda motor	26	1	27
7	Transformator	1	-	1
8	Termometer standart	-	1	1
9	Mein ketk manual standart	-	2	2
10	Rak besi/ metal	2	-	2
11	Rak kayu	5	-	5
12	Filling besi/Metal	2	-	2
13	Lemari kayu	7	13	20
14	Kotak penyimpanan	5	-	5
15	Papan nama instansi	10	-	10
16	Papan pengumuman	-	26	26
17	Papan Tulis	1	3	4
18	White Board	5	-	5
19	Alat Kantor lainnya	-	6	6
20	Plang Tanda kepemilikan	1	-	1
21	Kursi besi/ metal	54	-	54
22	Meja rapat	-	6	6
23	Meja tambahan	-	1	1
24	Kursi rapat	73	-	73
25	Kursi Tamu	1	1	2

26	Kursi Putar	9	1	10
27	Kursi Biasa	5	-	5
28	Meja komputer	4	1	5
29	Meja Biro	42	2	44
30	Sofa	1	-	1
31	Kursi kerja	3	-	3
32	Gordyn	-	26	26
33	Jam mekanis	3	-	3
34	Mesin penghisap debu/ Vacuum cleaner	1	-	1
35	AC unit	2	-	2
36	Ac Split	4	-	4
37	Kipas angin	21	-	21
38	Exhause fan	16	-	16
39	Televisi	-	1	1
40	Loudspeaker	4	1	5
41	Alat Hiasan	-	1	1
42	Lambang Garuda Pancasila	1	-	1
43	Gambar Presiden/ wakil Presiden	-	1	1
44	Tangga Alumenium	1	-	1
45	Dispenser	1	-	1
46	Tandon Air	1	-	1
47	Tempat Sampah	6	-	6
48	PC/Unit/ Komputer PC	15	2	17
49	Laptop	16	1	17
50	Note Book	6	-	6
51	Printer	10	2	12
52	Harddisk Eksternal	1	-	1
53	Server	2	-	2
54	Router	4	-	4
55	Wireless Access Point	1	-	1
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	-	4
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	4

62	Kursi Rapat ruangan rapat staf	36	-	36
63	Lemari arsip untuk arsip dinamis	8	-	8
64	Camera + Attachment	1	-	1
65	Proyektor + Attachment	10	1	11
66	UPS	1	4	5
67	Handycamp	1	-	1
68	Pesawat Telepon	-	2	2
69	Facsimili	1	1	2
70	Public adress (Lapangan)	3	-	3
71	Schereme/Penyekat	-	1	1
72	Kursi Roda	9	-	9
73	Gevecolod Bed	1		1
74	Ventilation Fan	6	-	6
75	Alat pemadam kebakaran	3	-	3
76	Alat peraga KIE KIT	2	-	2
77	Alat peraga BKB KIT	1	-	1
78	APE	7	-	7
79	Kursi kayu	7	2	9
80	Troli	1	-	1
81	Bangunan Gedung	6	-	6
82	Bangunan Gudang	1	-	1
83	Sumur dengan pompa	2	1	3
84	Air Sumber Kapasitas Kecil	-	1	1
85	Jaringan Rumah tangga	-	1	1
86	Instalasi Listrik	2	-	2
87	Buku Perpustakaan	1	-	1
88	Pin Jabatan	1	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>499</b>	<b>115</b>	<b>614</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dalam keadaan baik.

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022), dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Dinas pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	85	85	100	100	100	85	73	75	73	71	100	85.88	75	73	71
3	Jumlah anak per keluarga	Org/ 1000	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	100	100	100	100	100
4	Persentase Rasio Akseptor KB pria	%	8	8	8	8	8	8	9	2	22	4	100	112.50	25	275	50
5	Persentase Peserta KB baru	%	50	70	80	90	100	50	122	50	70	101	100	174.29	62.50	77.78	101
6	Peserta MOP (Medis Operasi Pria)	Org	80	80	80	100	100	55	85	50	90	100	68.75	106.25	62.50	90	100
7	Peserta MOW (Medis Operasi Wanita)	Org	125	125	125	125	125	100	226	44	50	50	80	180.80	35.20	40	40
8	Jumlah kelompok Bina Keluarga yang aktif	Klp	36	45	60	75	105	36	36	45	105	106	100	80	75.00	140	100.95

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya sudah mencapai target tetapi beberapa indikator yang lain masih sangat rendah dan harus ditingkatkan kembali. Adapun indikator kinerja yang telah mencapai target adalah sebagai berikut;

1. Prevalensi peserta KB Aktif, dengan capaian 71 %
2. Jumlah anak per keluarga, dengan capaian 2 perkeluarga
3. Persentase peserta KB baru, dengan capaian 100 %
4. Peserta MOP (Medis Operasi pria) dengan capaian 100 Orang
5. Jumlah kelompok bina keluarga yang aktif, dengan capaian 105 kelompok

Keberhasilan pencapaian target tersebut diatas tentu saja didukung oleh beberapa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang sangat mendukung keberhasilan indikator tersebut adalah dukungan dan peran serta masyarakat dalam mensukseskan program KKBPK. Selain peran serta masyarakat dukungan eksternal yang lain adalah kerjasama serta koordinasi yang baik dari Organisasi Perangkat Daerah serta Lembaga/Instansi lain di Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mensukseskan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.

Selain keberhasilan yang dicapai, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menghadapi permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan sehingga indikator yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Beberapa Indikator yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut ;

1. Persentase Rasio akseptor KB pria, dengan capaian 4%;
2. Peserta MOW (Medis Operasi wanita), dengan capaian 50 orang;

Permasalahan yang dihadapi sehingga keberhasilan tidak tercapai dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender dikalangan masyarakat sehingga peserta KB didominasi oleh perempuan selain itu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB medis Operasi Pria (MOP) dan Medis operasi wanita (MOW).

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tebing Tinggi**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Belanja Daerah																	
2	Belanja Pegawai																	
3	Belanja Barang dan Jasa																	
4	Belanja Modal																	

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dengan memperhatikan kondisi dan isu yang berkembang di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi serta untuk serta untuk memenuhi tuntutan birokrasi yang profesional sebagai konsekuensi perkembangan arus informasi dan globalisasi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu mengambil langkah menuju perubahan serta perlu mempersiapkan hal hal untuk menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan dimasa depan.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan yang saat ini dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum meratanya akses dan pelayanan KB kepada masyarakat hal ini dilihat dari angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, kebutuhan ber-KB (Unmet Need) yang tidak terpenuhi masih tinggi, tingkat putus pakai kontrasepsi masih tinggi, penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang cenderung menurun.
- b. Masih lemahnya penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi. Hal ini dapat dilihat dari masih lemahnya dukungan para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap program KKBPK terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan program penganggaran, masih tingginya keluarga yang menginginkan banyak anak, masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK antara wilayah pinggiran dengan perkotaan.
- c. Masih lemahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya perilaku seks pranikah disebagian kalangan remaja yang berakibat banyaknya perkawinan usia muda, angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun masih tinggi.
- d. Belum optimalnya penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana. Hal ini terlihat dari belum seluruhnya kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang pengendalian penduduk dan KB dimasukkan dalam perencanaan daerah, koordinasi pembangunan bidang pengendalian penduduk dan kb dengan bidang lainnya masih lemah<sup>9</sup> antara lain koordinasi program bantuan pemerintah seperti



program keluarga harapan, Jamkesmas/bpjs dan PNPM) serta perlunya i penguatan koordinasi bidang KKB lintas sector (Kampung KB )

- e. Terbatas jumlah Penyuluh KB (PKB/PLKB) untuk melakukan penyuluhan KB mengingat jumlah PLKB /PKB yang ada tidak dapat sepenuhnya menjangkau lokasi/wilayah kerjanya. (1 orang PLKB harus menjangkau 2 kelurahan sekaligus dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi)

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Beberapa peluang yang dimiliki pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam memberhasilkan program dan kegiatan bidang urusan Pengendalian Penduduk dan KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Program KKBPK.
- b. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah pusat maupun kementerian/Lembaga terkait (BKKBN) agar menuangkan program KKBPK dalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- c. Tenaga penyuluh KB dan petugas Lapangan KB(PKB/PLKB) serta kader KB seperti PPKBD dan Sub PPKBD yang merupakan pembantu PLKB dalam mengimplementasikan Program KKBPK di lapangan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan KB dilapangan seperti Bus Pelayanan KB keliling yang melakukan pelayanan KB kepada masyarakat di posyandu , Mobil penerangan KB yang melakukan KIE KB melalui Film KB

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Permasalahan dibidang Kesekretariatan
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial.
  2. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  
- b. Permasalahan di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
  1. Belum Optimalnya sinergitas dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.
  2. Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi modern.
  3. Masih rendahnya kesertaan KB metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB pria
  4. Belum Optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah berkerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIMBKKBN
  5. Belum optimalnya cakupan pemakaian kontrasepsi dimana cakupannya tidak mengalami kenaikan secara signifikan.
  6. Rendahnya partisipasi masyarakat yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
  7. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih banyak keluarga yang menginginkan banyak anak.
  8. Tingginya peserta KB yang putus pakai (Drop Out)
  9. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) masih tinggi.
  10. Belum optimalnya peran tenaga lapangan KB dalam Konseling KB.
  11. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap

program KKBPK terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.

- c. Permasalahan dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
1. Masih tingginya angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun.
  2. Belum Optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
  3. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
  4. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.
  5. Kurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
  6. Masih terjadi disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sector terkait pusat informasi dan konseling (PIK R).
  7. Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama yang rendah.
  8. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
  9. Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja.
  10. Peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian ber-KB
  11. Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
  12. Masih kurangnya sosialisasi program genre ke forum anak dan posyandu remaja.
  13. Masih kurangnya pembinaan kepada bina keluarga lansia.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Tujuan Pemimpin Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada periode RPD Tahun 2023-2026 adalah:

**“ Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas,Layak, Mandiri dan sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”.**

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah Kota jasa yang berarti memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD periode tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik.
2. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota jasa.
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota jasa.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Perkotaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi mendukung pencapaian beberapa misi yaitu :

- a. Misi ke- 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi pada misi ke-1 adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas, dengan sasaran Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- b. Misi ke- 3 : Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi pada misi ke-3 adalah Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional, dengan sasaran Optimalisasi pelayanan kesehatan dan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dengan secara berkeadilan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat  
Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik</p> <p>Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih Rendahnya sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan jumlah tenaga Aparat Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan serta komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM.</li> </ul>
2.	<p>Misi 3 : Mewujudkan kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa</p> <p>Tujuan : Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya cakupan pemakaian kontrasepsi.</li> <li>- Rendahnya partisipasi masyarakat yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP),</li> <li>- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih banyak keluarga yang menginginkan banyak anak,</li> <li>- Fasilitas pelayanan KB masih banyak yang belum bersinkronisasi dengan program BPJS,</li> <li>- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) masih tinggi,</li> <li>- Belum optimalnya peran tenaga lapangan KB dalam Konseling KB,</li> <li>- Masih tingginya angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun,</li> <li>- Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama yang rendah,</li> <li>- Rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR),Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja,</li> <li>- Peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya jumlah Tenaga Penyuluh KB lapangan (PKB/PLKB).</li> <li>• Terbatasnya anggaran yang mendukung pelaksanaan proram KKBPK.</li> <li>• Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki.</li> <li>• Terbatasnya fasilitas kesehatan pelayanan KB yang bersinkronisasi dengan BPJS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan instansi terkait dalam pelaksanaan program KKBPK.</li> <li>• Adanya komitmen pemerintah untuk mendukung kebijakan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan KKBPK</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		mendukung pembinaan kelestarian ber-KB.		

### 3.2 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga

#### 3.3.1. Telaahan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta Program Prioritas (PP) dan kegiatan prioritas (KP) sebagaimana diatas, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara 2020-2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan baik diseluruh tingkatan wilayah. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan visi dan misi pemerintah periode tahun 2020-2024 dalam rangka “meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju”. Adapun visi Presiden adalah “terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi, misi dan janji Presiden RI 2020-2024, BKKBN akan berkontribusi dalam upaya “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang dengan SDM yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.”

### **b. Sasaran Strategis BKKBN**

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian visi, misi dan janji Presiden 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan baik, maka ditetapkan ukuran pencapaian Program dan Kegiatan Prioritas ke dalam Sasaran Strategis yang mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) menjadi 2,11 di tahun 2024.
2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Method/mCPR) menjadi 58,08 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan menjadi 8,11 persen pada tahun 2024.
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dengan target 16 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 64,55 pada tahun 2024
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan menjadi 23,2 tahun pada tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2020-2024, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Program  
Perw. BKKBN Prov. Sumut Tahun 2020-2024**

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahu	2,93 (SDKI 2017)	2,20	2,18	2,16	2,14	2,11
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	43,90 (SDKI 2017)	56,57	56,92	57,27	57,62	58,08
3 Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,70 (SDKI 2017)	8,64	8,50	8,36	8,21	8,11
4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	n/a	22	21	18	17	16
5 Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	n/a	56,69	58,2	60,32	62,44	64,55
6 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Umur 25- 49 Tahun	n/a	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
7 Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten	n/a	30,0	45,0	65,0	75,0	80,0
8 Persentase Kerjasama Internasional Bangsa Kencana yang Diimplementasikan**	n/a	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0
9 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangsa Kencana	n/a	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.



**Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran Total (TFR) belum sesuai yang diharapkan sebesar 2,	- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan oleh setiap keluarga.	Tersedianya tenaga penyuluh KB serta Kader KB untuk melakukan penyuluhan KB
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Akses dan kualitas pelayanan KB belum sesuai standart.	- Keterbatasan dan persebaran klinik pelayanan KB serta tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB seperti memberikan penjelasan tentang pilihan menggunakan metode KB secara komprehensif termasuk efek samping serta kegagalannya.	Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menambah fasilitas kesehatan pelayanan KB yang harus bekerja sama dengan BPJS.
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	- Tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih tinggi. - Peran tenaga lapangan dalam konseling KB belum optimal.	- Terbatasnya jumlah PLKB untuk melakukan konseling KB.	Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan peningkatan dan pendayagunaan jumlah PLKB
4	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Tingginya pernikahan anak usia remaja	- Pernikahan perempuan dibawah umur 20 tahun masih tinggi.	-Tersedianya tenaga penyuluh KB serta Kader KB untuk melakukan penyuluhan KB
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga	-Kurangnya keinginan masyarakat tentang informasi ketahanan keluarga	-Tersedianya tenaga penyuluh KB serta Kader KB untuk melakukan penyuluhan KB
6	Meningkatnya	Masih banyaknya	-Kurangnya pemahaman remaja	- Tersedianya tenaga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Median Kawin Usia Pertama (MKUP) Perempuan.	perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama yang rendah	dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.	penyuluh KB serta Kader KB untuk melakukan penyuluhan KB.

### 1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota tebing Tinggi dalam melaksanakan progam dan kegiatan Tahun 2023-2026 tidak akan melakukan perubahan pola ruang dan struktur ruang dalam dokumen RTRW. Selain itu juga program dan kegiatan tidak menimbulkan dampak lingkungan strategis.

### 1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:
  - Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga,
  - Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB;
  - Penguatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal;
  - Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.
2. Tidak meratanya Akses dan Kualitas Pelayanan KB sehingga mengakibatkan permasalahan pelayanan KB, antara lain:
  - Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan
  - Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi,
  - Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen;
  - Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (MKJP) cenderung menurun,

- Rendahnya kesertaan KB Pria.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
- Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi,
  - Masih banyaknya perkawinan usia muda,
  - Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
  - Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah;
  - Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
4. Belum optimalnya Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:
- Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;
  - Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;
  - Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;
5. Masih lemahnya ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing tinggi**

- **Tujuan** merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.
- **Sasaran** merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Tebing tinggi Tahun 2023-2026**

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>Tujuan 1 :</b>													
	<b>Peningkatan Sumber Daya Manusia</b>													
	<b>Sasaran 1.</b>													
	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate / TFR) Total Per WUS Usia 15- 49 Tahun	2,28	2,25	1.790	2,22	1.985	2,20	2.185	2,20	2.375	2,20	8.335	PPKB
	<b>Sasaran 2.</b>													
	Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate / mCPR)	78,83	79	560	79,5	620	80	680	80	750	80	2.610	PPKB

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sasaran 3.													
	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	24	23,8	250	23,6	275	23,4	300	23,2	325	23,2	1.150	PPKB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi (2023-2026)**

Dalam mencapai upaya Tujuan diperlukan adanya strategi dan arah kebijakan.

- **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
- **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan partisipasi, Pemahaman dan kesadaran keluarga dan remaja tentang kesehatan Reproduksi.
3. Advokasi Program Bangga Kencana/ KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan)
4. Peningkatan Kesertaan dan Pelayanan KB yang merata dan Berkualitas

##### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan remaja dan kesejahteraan keluarga.
3. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga.
4. Pengembangan kampung KB.
5. Pemenuhan alokon pada Fasilitas Kesehatan.
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia dalam pelayanan KB.

Selanjutnya Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan serta Sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi (2023-2026) disajikan pada table sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026**

VISI :			
Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik</b>			
Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang melayani	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
<b>MISI III : Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Peningkatan Sumber Daya Manusia	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Peningkatan Kesertaan dan Pelayanan KB yang merata dan Berkualitas	Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga
	Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Peningkatan Kesertaan dan Pelayanan KB yang merata dan Berkualitas	Pengembangan kampung KB
	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Peningkatan partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga dan remaja tentang kesehatan reproduksi	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan remaja dan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya Kelompok Bina Keluarga Yang Menggerakkan Partisipasi Masyarakat	Advokasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga)	Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga
	Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana	Peningkatan Kesertaan dan Pelayanan KB yang merata dan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia dalam pelayanan KB



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Didalam Dokumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 telah tertuang strategi pengembangan program bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari program, kinerja program, kegiatan, kondisi kinerja pada awal RPJMD, capaian kinerja 4 tahun ke depan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan.

- Uraian Nama program Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi selama lima tahun.
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  - d. Program Keluarga Berencana
  - e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  - f. Program Pelayanan Kontrasepsi
  - g. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi tercantum pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																Dinas PPKB
2.14.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																Dinas PPKB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	30,350, 000												Dinas PPKB

2.14.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															Dinas PPKB
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	2,683,464,608												Dinas PPKB
2.14.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															Dinas PPKB
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,946,000												Dinas PPKB
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39,723,000												Dinas PPKB
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,502,800												Dinas PPKB
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	297,831,000												Dinas PPKB
2.14.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															Dinas PPKB

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	153,39 2,800												Dinas PPKB
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															Dinas PPKB
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59,942, 880												Dinas PPKB
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	212,203, 200												Dinas PPKB
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>															Dinas PPKB
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	73,793, 000												Dinas PPKB
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19,799, 200												Dinas PPKB
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	315,19												Dinas PPKB

		Dipelihara/Direhabilitasi			9,000											
2.14.02	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>															
2.8.15	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>															<b>Dinas PPKB</b>
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kab/kota dalam rangka penegndalian Kuantitas Penduduk.</b>															<b>Dinas PPKB</b>
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga (program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ProgramBanga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) )		4 Dokume n	49,999, 900											<b>Dinas PPKB</b>
	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kpendudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/kota.	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokume n	28,627, 200											<b>Dinas PPKB</b>
	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan	Jumlah Satuan Pendidikyang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan KependudukanJalur		6 Satuan Pendidik an	39,560, 500											<b>Dinas PPKB</b>

	pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Nonformal dan informal.	Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</b>																	<b>Dinas PPKB</b>
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		1 dokumen	14,613,100													<b>Dinas PPKB</b>
	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan		1 Dokumen	34,699,600													<b>Dinas PPKB</b>
	Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di sektor lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk.		5 Unit	74,943,500													<b>Dinas PPKB</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		12 Laporan	34,999,400													<b>Dinas PPKB</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga		1	9,499,8													<b>Dinas PPKB</b>

		yang Tersedianya		Dokumen	00										
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		12 dokumen	14,984,000										Dinas PPKB
	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>														Dinas PPKB
	<b>Pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Budaya Lokal</b>														Dinas PPKB
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		50 Unit	27,499,500										Dinas PPKB
	Bulan Peduli Kesro bagi PUS Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang.	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		10 Dokumen	77,888,000										Dinas PPKB
	Penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan	Jumlah dokumen media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK		10 dokumen	74,795,000										Dinas PPKB

	program KKBPK.															
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rakorcam, Rakordes dan Minilok.	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		50 dokumen	75,000, 000											<b>Dinas PPKB</b>
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		12 Laporan	154,96 6,680											<b>Dinas PPKB</b>



	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		5 Laporan	54,972, 000													Dinas PPKB
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>																	Dinas PPKB
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini dan Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		8 Organisasi	50,000, 000													Dinas PPKB
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB )	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		1 laporan	174,99 0,800													Dinas PPKB
	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		214 orang	159,97 4,000													Dinas PPKB

	<b>Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota</b>															<b>Dinas PPKB</b>
	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		100 laporan	44,999,800											<b>Dinas PPKB</b>
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1200 orang	147,708,000											<b>Dinas PPKB</b>
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		35 unit	298,141,200											<b>Dinas PPKB</b>
	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		25 laporan	20,900,300											<b>Dinas PPKB</b>
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.	Jumlah Laporan Dukungan														<b>Dinas PPKB</b>

		Operasional Pelayanan KB Bergerak		60 Laporan	51,561, 900										
	Peningkatan kesertaan KB Pria.	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		50 Orang	58,121, 800										Dinas PPKB
	<b>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</b>														Dinas PPKB
	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		10 Organisasi	88,856, 000										.
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPB di kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		5 Kampung KB	75,000, 000										Dinas PPKB
	Pembinaan terpadu kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan													Dinas PPKB

		Terpadu Kampung KB		5 Laporan	48,780, 000														
	<b>Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera</b>																		<b>Dinas PPKB</b>
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dankesejahteraan keluarga																		<b>Dinas PPKB</b>
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( Bina Kelurga Balita, Bina keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Koselig Remaja, Bina keluarga Lansia, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk		1 Kelompok	25,000, 000														<b>Dinas PPKB</b>
	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dankesejahteraan keluarga. (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		22 laporan	105,35 6,000														<b>Dinas PPKB</b>

	Orientasi dan pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0 Orang	50,499,800											<b>Dinas PPKB</b>
	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		169 orang	189,789,600											<b>Dinas PPKB</b>
	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		27 Kelompok	51,688,900											<b>Dinas PPKB</b>
	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (BKB, BKR, BKL,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan		4 Laporan	181,652,000											<b>Dinas PPKB</b>

PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.(Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga )	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		12 laporan	250,84	4,500										<b>Dinas PPKB</b>
			Total	<b>6,746,0</b>	<b>60,268</b>										

**Bab VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

N O	Indikator	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi akhir
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Total Fertility Rate	2,28	2,25	2,22	2,20	2,20	2,28
2	Persentase Peserta KB aktif	78,83	79	79,5	80	80	78,83
3	Median Usia Kawin Pertama	24	23,8	23,6	23,4	23,2	24

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis merupakan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Dalam Renstra ini telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi yang di susun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026

Dalam pencapaian target-target renstra serta pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra agar berjalan dengan baik diperlukan dukungan dari seluruh pegawai yang ada di Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka akan dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.